



ANALISIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (AMERIKA DAN INDONESIA)

Hestiningtyas Yuli Pratiwi^{1*}, Dedi Kuswandi²

¹ Prodi Pendidikan Fisika, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Kota Malang

² Departemen Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Kota Malang

Email: ¹ hesti@unikama.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to find out the rules that apply to the education system in the United States and to find out the regulations regarding the education system in Indonesia and the implementation of education. This research method uses library research, by examining books, documents and journals as sources of information. In the process, this research uses data collection techniques in the form of content analysis. The results of the research show that in the education system in Indonesia in particular, a number of implications must be met so that the goals and benefits of SBM can be achieved in the form of changes in the roles of parties including education service officials, school supervisors, school principals, teachers and students, as well as the community and people. Indonesian education stakeholders must be able to create school innovation (struggling schools) and school accountability. Therefore, it is very important to get to know the education system in America. 1) Theoretical implications provide contributions regarding education management with various approaches, concepts and theoretical approaches. 2) Practical implications contribute to professional practice, staff development, formation and development of professional organizations for educators, parents and students.*

Keywords: Education, America, Indonesia

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan yang berlaku pada sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) dan mengetahui pengaturan mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan pelaksanaan pendidikannya. Metode penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan mengkaji buku, dokumen, dan jurnal sebagai sumber informasi. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia khususnya, sejumlah implikasi yang harus dipenuhi agar tujuan dan manfaat MBS dapat dicapai berupa perubahan peran dari pihak yang mencakup pejabat dinas pendidikan, para pengawas sekolah, para kepala sekolah, para guru dan siswa, maupun masyarakat dan orang tua siswa. Stakeholder pendidikan Indonesia harus mampu menciptakan inovasi sekolah (*struggling schools*) dan akuntabilitas sekolah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengenal sistem pendidikan di Amerika. 1) Implikasi teoritis memberikan kontribusi mengenai pengelolaan pendidikan dengan berbagai pendekatan, konsep dan pendekatan secara teoritis. 2) Implikasi praktis memberikan kontribusi dalam praktik profesional, pengembangan staf, pembentukan dan pembinaan organisasi profesional untuk pendidik, orang tua maupun siswa.

Kata Kunci: Pendidikan; Amerika; Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, memainkan peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat. Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, sebagai dua negara yang memiliki sistem pendidikan yang cukup berbeda, menjadi fokus perbandingan dalam analisis ini. Keduanya memiliki sejarah pendidikan yang unik, dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan kebijakan politik yang berbeda (Pala et al., 2020).

AS dengan sistem pendidikan yang terdesentralisasi, menempatkan tanggung jawab utama pada tingkat pemerintah negara bagian dan lokal. Dengan kata lain, tiap negara bagian

memiliki otonomi dalam menyusun kurikulum, menentukan standar pembelajaran, dan mengelola pendidikan di tingkat lokal. Sementara itu, di Indonesia, sistem pendidikan lebih terpusat, dengan pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur kebijakan pendidikan nasional. Perbedaan struktur pendidikan juga menjadi bagian integral dalam analisis ini. AS memiliki sistem pendidikan yang luas, mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi (Wahab Syakhrani et al., 2022). Sementara itu, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dengan tingkatan-tingkatan tersebut masing-masing memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan peran teknologi dalam pendidikan. AS dikenal sebagai pionir dalam pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran, dengan akses ke fasilitas dan sumber daya digital yang merata. Sebaliknya, Indonesia tengah menghadapi tantangan dalam memastikan akses yang merata ke teknologi pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil (Asri, 2017).

Dalam konteks globalisasi, pemahaman tentang bagaimana kedua negara menghadapi tantangan dan peluang pendidikan menjadi krusial. Melalui analisis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia, diharapkan dapat muncul wawasan yang mendalam mengenai upaya dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kedua negara ini. Pengelolaan pendidikan di AS lebih banyak ditangani oleh masyarakat sendiri ketimbang oleh pemerintah, sangat desentralistik. Semenjak masa pemerintahan presiden Ronald Reagon (1981-1989) dimulai pengurangan bantuan dana serta campur tangan pemerintah federal terhadap pendidikan dan menyerahkan tanggung jawab ke negara bagian. AS telah berhasil menyediakan pendidikan gratis selama 12 tahun dan biaya pendidikan yang relatif murah pada tingkat pendidikan tinggi (Harianto, 2021). Karakteristik utama sistem pendidikan di AS yang demikian akan lebih baik jika pemerintah Indonesia mampu mengambil kebijakan yang tepat.

Berkaca pada pendidikan yang berlangsung di AS, banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan di AS sudah mantap dan hampir tidak mempunyai masalah yang berarti. Mereka beranggapan seperti ini karena memiliki alasan yang kuat seperti kestabilan ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. AS sendiri telah lama merintis dan melaksanakan sistem pendidikan. Beberapa hal yang akan dibandingkan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pendidikan di AS jika dibandingkan dengan sistem pendidikan Indonesia. Bagaimana desentralisasi pendidikan dijalankan di AS. Kemajuan pendidikan yang dialami AS relatif singkat dan tepat sehingga banyak negara yang mengirimkan warganya untuk belajar. Pendidikan di AS menerapkan model penerapan konsep sekuler-kapitalisme, walaupun bukan hanya AS yang menerapkan konsep sekuler-kapitalisme namun karena saat ini AS merupakan negara adi daya maka konsepnya dalam berbagai bidang akan terasa pengaruhnya di negeri lain (Yanuarti et al., 2020).

Sejarah sistem pendidikan di Indonesia pada masa reformasi diwarnai oleh keadaan politik dan ekonomi pada saat itu. Pada masa tersebut telah lahir Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah. Pentingnya melakukan komparasi sistem pendidikan di AS dan Indonesia tidak hanya sebatas perbandingan statistik atau struktural, melainkan membuka peluang untuk memahami berbagai aspek kritis dalam pembentukan dan pengelolaan sistem pendidikan. Pertama, perbandingan ini memberikan wawasan mendalam terhadap keberhasilan dan kegagalan masing-masing sistem dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan memahami strategi, kebijakan, dan praktik terbaik di kedua negara, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat mengadopsi inovasi yang berhasil dan merancang solusi khusus untuk masalah yang mungkin dihadapi (Mustika et al., 2022).

Selain itu, komparasi sistem pendidikan juga memungkinkan teridentifikasinya tren global dalam pendidikan. Dengan membandingkan praktik di AS dan Indonesia, kita dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan global dan mengevaluasi sejauh mana kedua negara telah beradaptasi atau memanfaatkan peluang tersebut. Hal ini dapat memberikan landasan bagi perubahan kebijakan yang lebih

kontekstual dan responsif terhadap tantangan masa kini, termasuk integrasi teknologi, peningkatan kurikulum, dan pengembangan keterampilan yang relevan (Gp, 2016).

METODE

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dan kemudian meng gambarkannya dalam bentuk kata-kata dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengkaji buku, dokumen, dan juga memanfaatkan jurnal-jurnal penelitian yang tersedia di internet sebagai sumber informasi. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa content analysis atau analisis isi, yang merupakan pendekatan untuk menganalisis konten teks terkait informasi yang ada.

HASIL PENELITIAN

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan sarana pendidikan baik sekolah maupun pendidikan tinggi (Purwanta, 2016).

Namun, semenjak Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1989), intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 Negara Bagian dan 15.358 Distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah.

Tingkat nasional yaitu lokal dan pusat dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal yang dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan. Namun, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dijelaskan sebagai berikut.

A. Tanggung Jawab dan Kegiatan Sekolah Lokal

Pendidikan di Amerika Serikat diatur dalam empat level yaitu pemerintah lokal, menengah, negeri, dan pusat. Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan nasional yang terpusat seperti sistem di negara Inggris, Perancis atau Jepang. Amerika Serikat memiliki lima puluh sistem pendidikan negeri yang berbeda dan banyak perbedaannya antara sistem sekolah lokal bahkan dalam negara bagian yang sama. Undang-undang (UU) Amerika Serikat tidak menyebutkan pendidikan umum, tetapi amandemen UU yang kesepuluh memberikan kekuasaan penuh kepada negara bagian dan tidak secara spesifik mendelegasikannya kepada pemerintah federal (desentralisasi). Amademen ini merupakan dasar untuk mengalokasikan tanggungjawab utama negara bagian atas pendidikan umum. Negara bagian kemudian mendelegasikan berbagai tanggung jawab tentang pelaksanaan sistem sekolah sehari-hari pada distrik lokal.

1. Karakteristik Dewan Sekolah Lokal

Dewan sekolah lokal telah didelegasikan untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan yang signifikan. Anggota dewan sekolah lokal ditentukan oleh hukum negara bagian melalui dua metode yaitu penunjukkan dan pemilihan. Pemilihan dilakukan dengan tujuan sebagai tanggung jawab kepada publik. Metode pemilihan ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Masyarakat memilih melalui pemilu lokal yang disebut wakil-wakil mereka yang akan mengurus urusan pendidikan, yaitu *local school committee* atau dewan sekolah lokal yang keberadaannya ditingkat kota/kab. Komite sekolah berjumlah berkisar 5-7 orang tergantung jumlah penduduk, dan mereka akan memilih yang disebut *Super Intendants* sebanyak 1 orang. Maka untuk urusan pendidikan komite sekolah berfungsi sebagai legislatifnya dan *super intendant* sebagai eksekutifnya atau kepala dinas. Jadi semacam ada 2 pemerintahan ditingkat lokal, yaitu pemerintahan yang mengurus pendidikan, dan pemerintahan yang mengurus selain pendidikan. Eksekutif yang mengurus pendidikan disebut *super intendant* dan eksekutif yang mengurus selain pendidikan disebut mayor atau *town manager*.

Permasalahannya adalah apakah dewan sekolah yang terpilih telah merefleksikan keanekaragaman masyarakat? Berdasarkan survey yang dilakukan Asosiasi Dewan Sekolah Nasional dilaporkan bahwa jumlah wanita dalam dewan sekolah lokal pada tahun 2002 mencapai 40% yang artinya meningkat dari tahun 1981 yang berjumlah 33%. Perwakilan minoritas meningkat pada waktu yang bersamaan dari 8,5% menjadi 14% dan jumlah tersebut masih terus tertinggal dari peningkatan proporsi siswa minoritas di sekolah negeri di AS (43% pada tahun 2005). Sistem sekolah yang memiliki jumlah siswa yang besar (25.000 orang atau lebih) cenderung memiliki dewan sekolah yang heterogen dari segi ras.

Hasil survey ini mencerminkan jumlah anggota minoritas sebanyak 20% dari keanggotaan dewan sekolah dalam sistem ini dan jumlah wanita sebanyak 45%. Anggota dewan sekolah lokal ini 45% berusia lebih dari 50 tahun, 67% berpendidikan sarjana, 59% berasal dari kalangan ekonomi atas yang berpenghasilan lebih dari \$7.500 per tahunnya. Sebanyak 96% dari mereka memiliki anak usia sekolah dan 13% diantaranya anak mereka tidak bersekolah di sekolah negeri. Dilihat dari segi pandangan politik anggota dewan sekolah lokal, 36% dari mereka memiliki pandangan politik konservatif, 45% moderat, dan 16% liberal. Pandangan politik para anggota dewan sekolah lokal tersebut dapat saja mempengaruhi pilihan mereka terhadap permasalahan sekolah di distrik mereka.

2. Tanggung Jawab Dewan Sekolah

Tugas dari Dewan Sekolah adalah: 1) mengurus anggaran pendidikan, 2) mengangkat Super Intendant (SI); 3) membuat kebijakan pendidikan termasuk kurikulum; dan 4) melaporkan ke publik (masyarakat). Kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Sekolah dapat dikelompokkan dalam kebijakan, staff pegawai, keuangan, siswa, kurikulum dan penilaian, persyaratan pemerintah, dan hubungan dengan masyarakat. Dewan sekolah bertanggung jawab untuk melihat apakah sekolah dijalankan dengan baik oleh personel pendidikan yang profesional. Dewan sekolah sering mendelegasikan kekuasaan legalnya kepada pengawas dan stafnya, khususnya di distrik yang lebih luas.

3. Pengawas Sekolah (*Super Intendant*) dan Staf Kantor Pusat

Salah satu tanggung jawab terpenting dewan sekolah adalah menunjuk pengawas sekolah yang kompeten (*Super Intendant*). Pengawas adalah petugas kepala eksekutif dari sistem sekolah, sedangkan dewan sekolah adalah badan legislatif pembuat kebijakan. Walaupun sebagian besar pengawas adalah pendidik, sejumlah distrik sekolah mempekerjakan pemimpin dari sektor swasta sebagai pengawas. Tugas *Super Intendant* adalah: 1) Mengangkat *Principals* atau Kepala Sekolah; 2) mengangkat staf dan direktur-direktur pendidikan (subdin-subdin); 3) melaksanakan pengelolaan pendidikan; dan 4) melaporkan ke komite sekolah. Staf kantor pusat bertugas untuk membantu pengawas. Distrik yang besar dengan jumlah siswa lebih dari 25.000 orang biasanya memiliki hierarki staf seperti wakil pengawas, asisten pengawas, direktur, kepala departemen, dan koordinator dan supervisor yang masing-masingnya memiliki staf pendukung.

4. Kepala Sekolah (*Principals*) dan Sekolah

Tugas dari *Principals* adalah: 1) Sebagai manager di sekolah, mengangkat guru-guru, melaksanakan kurikulum dan melaporkan ke SI. Tugas guru adalah 1) membuat draft kurikulum; 2) menentukan buku (tapi tidak boleh menjual); 3) mengajar, dan melaporkan ke principals; 4) mengetahui kurikulum yang tertulis; 5) memantau kurikulum yang diajarkan; 6) memberi masukan terhadap kurikulum yang tertulis dan diujikan; 7) menganalisis data ujian; 8) menentukan rencana pengembangan pencapaian akhir siswa dengan melibatkan semua guru; dan 9) memberitahu orang tua siswa cara membantu anaknya agar berhasil. Secara umum kepala sekolah menengah cenderung melihat diri mereka sendiri sebagai manager umum, sedangkan kepala sekolah dasar memandang diri mereka sendiri sebagai pemimpin dalam kurikulum dan pengajaran. Di sekolah menengah yang besar interaksi guru dan kepala sekolah sangat minimal, sedangkan di sekolah dasar interaksi antara guru dan kepala sekolah dapat dikatakan sering.

5. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Banyak pendidik yang melibatkan orang tua karena beberapa alasan seperti terkait nilai siswa, kehadiran siswa, dan sikap siswa. Secara nasional terbukti bahwa masyarakat sangat mendukung keterlibatan orang tua dan mereka percaya bahwa orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Akan tetapi, guru merasa bahwa tidak semua orang tua memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terlibat dalam pendidikan anaknya. Bentuk umum dari partisipasi masyarakat adalah dengan terlibat dalam komite penasehat pada tingkat sekolah lingkungan sekitar atau dewan pusat. Komite ini biasanya ditunjuk oleh petugas sekolah untuk memberikan bantuan dan saran kepada dewan sekolah dalam hal: 1) Identifikasi tujuan, prioritas, dan kebutuhan. 2) Pemilihan dan evaluasi guru dan kepala sekolah. 3) Pengembangan kurikulum dan ekstrakurikuler. 4) Dukungan untuk mendanai sekolah. 5) Rekrutmen sukarelawan. 6) Bantuan untuk siswa di sekolah dan program Hotline PR.

Dalam sistem kontrol masyarakat, badan atau dewan masyarakat yang terpilih bukan hanya memberikan saran tetapi juga berbagi kekuasaan dengan dewan sekolah pusat. Perkembangan terbaru dalam pelibatan masyarakat dibidang pendidikan adalah pembentukan sekolah Carter. Dalam penyelenggaraan ini, adanya dewan sekolah lokal atau dewan pendidikan negara bagian memberikan carter (kontrak yang menuliskan daftar hak, keistimewaan, dan harapan) yang memungkinkan suatu kelompok untuk mendirikan dan menjalankan sekolah umum. Pengaturan khusus mengenai keuangan, operasional sekolah, lokasi, pendaftaran siswa, dan pertanggungjawaban bisa dinegosiasikan. Jika sekolah carter gagal dalam memenuhi standar, maka ijinnya dicabut dan sekolah tersebut ditutup.

Sejak awal tahun 1980an, sekolah dianggap sebagai satu-satunya agensi pendidikan dalam masyarakat, sehingga sering disebut sebagai sekolah masyarakat. Sekolah masyarakat ini berperan sebagai rekan atau agen keajaiban sama dalam memberikan pendidikan, kesehatan, sosial, dukungan keluarga, rekreasi, dan kegiatan budaya bagi masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan *Public Schools*, berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat (Federal), Anggaran Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Empat dekade yang lalu, James Conant menyatakan bahwa sekolah yang paling efektif adalah sekolah yang cukup luas untuk memberikan fasilitas yang komprehensif dan beraneka ragam. Tetapi saat ini para pendidik menyatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang kecil. Pada tahun 2007 dilakukan penelitian terhadap 88 SMA kecil di New York yang hasilnya menunjukkan bahwa angka kelulusan sekolah kecil pada tahun 2006 lebih besar dibandingkan sekolah lainnya yang jadi pembanding. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa pembelajaran paling baik terdapat di SMA dengan jumlah siswa antara 600-900 siswa. Sekarang ini ukuran yang lebih kecil sering dianggap lebih baik. Dalam penelitian anggota dewan sekolah tahun 1993 menyatakan bahwa 78% responden yang disurvei percaya bahwa distrik yang lebih kecil lebih dapat dikelola dan dapat meningkatkan keterlibatan warga dibandingkan dengan ukuran distrik yang lebih besar.

Distrik sekolah meningkatkan jumlah siswa melalui pertumbuhan populasi dan konsolidasi ketika beberapa distrik sekolah digabung menjadi satu atau dua distrik yang lebih besar. Konsolidasi ini mampu mengurangi jumlah distrik secara drastis dari 130.000 pada tahun 1930 menjadi kurang dari 14.200 pada tahun 2006. Distrik sekolah berkonsolidasi terkait dengan beberapa hal ukuran, pelayanan dan ekonomi. Unit menengah atau Agensi Pelayanan Pendidikan regional (RESA) merujuk pada kantor atau agensi yang berada di posisi menengah diantara departemen pendidikan negara bagian dan distrik sekolah lokal. Agensi memberikan koordinasi dan pelayanan tambahan bagi distrik lokal dan menghubungkan kekuasaan pendidikan negara bagian dan lokal. Unit menengah merupakan perpanjangan hukum dan politis dari departemen pendidikan negara bagian dan dibentuk perundang-undangan negara bagian. Beberapa kasus, unit menengah memberikan bantuan yang sangat beraneka ragam kepada distrik sekolah di pedesaan dan memiliki sedikit staf administrasi. Unit ini memberikan dukungan dalam menemukan guru yang memenuhi standar kualitas, mengembangkan penilaian, menulis bantuan, melayani kebutuhan siswa-siswa pendidikan khusus, dan memberikan pelayanan bagi siswa yang belajar mengenai pembelajaran bahasa Inggris.

B. Tanggung Jawab dan Kegiatan Negara Bagian

Setiap negara bagian mempunyai tanggung jawab hukum untuk mendukung dan mempertahankan sekolah, negara bagian bertanggung jawab atas: 1) Pembuatan perundang-undang Pendidikan: 2) Menentukan pajak sekolah negeri dan bantuan dana bagi distrik sekolah lokal 3) Menentukan standar minimum untuk pelatihan dan rekrutmen personel tenaga Pendidikan, 4) Memberikan pedoman kurikulum, 5) Menciptakan persyaratan penilaian 6) Membuat ketentuan untuk sekolah-sekolah terakreditasi 7) Memberikan pelayanan khusus seperti transportasi siswa dan buku teks gratis. Negara bagian tidak bisa melaksanakan perundang-undangan yang dibuatnya jika hal tersebut bertentangan dengan undang-undang federal.

1. Gubernur dan Badan Pembuat Undang-Undang

Gubernur bisa membuat rekomendasi anggaran pendidikan ke badan pembuat undang-undang. Di banyak negara bagian, gubernur mempunyai aspek legal terhadap saldo akumulasi di perbendaharaan negara dan uang ini bisa digunakan untuk tujuan sekolah. Gubernur bisa menunjuk atau memberhentikan personel sekolah pada level negara bagian bahkan dapat juga memecat pengawas lokal. Disamping itu, gubernur juga dapat menveto badan pembuat undang-undang untuk membatalkan pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan pendidikan. Badan pembuat undang-undang bertanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan sekolah umum dan memiliki kekuatan yang luas untuk membuat undang-undang yang berhubungan dengan pendidikan. Kekuatan ini dibatasi oleh undang-undang federal, negara bagian dan keputusan pengadilan.

2. Dewan Pendidikan Negara Bagian

Dewan pendidikan negara bagian merupakan agensi pendidikan negara bagian yang paling berpengaruh dan penting kecuali di Wisconsin dan Minnesota. Tugas dan fungsi utama dewan pendidikan negara bagian ini berbeda-beda, tetapi sebagian besar mengembangkan peraturan untuk merapkan peraturan pendidikan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang.

3. Departemen Pendidikan Negara Bagian

Departemen pendidikan negara bagian biasanya beroperasi dibawah arahan dewan pendidikan negara bagian dan diatur oleh petugas kepala sekolah negara bagian. Departemen ini bertugas untuk mengumpulkan dan menyebarkan statistik mengenai status pendidikan di negara bagian. Intinya tugas mereka adalah menerapkan hukum yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan peraturan dewan pendidikan negara bagian.

4. Kepala Petugas Sekolah

Kepala petugas sekolah (pengawas atau komisaris pendidikan negara bagian) mengepalai departemen pendidikan dan juga kepala eksekutif dewan sekolah dan biasanya mereka adalah pendidik profesional.

C. Peran Pemerintah Pusat dalam Pendidikan

Peran pemerintah pusat terhadap pendidikan terbagi kedalam empat bagian yaitu: 1) Agensi federal yang mempromosikan kebijakan dan program pendidikan, 2) tren yang menggeser banyak keputusan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, 3) pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat, 4) keputusan mahkamah agung mengenai pendidikan. Sejak tahun 1787 sampai 1937 kongres di AS hanya membuat 14 UU pendidikan dan dalam 7 dekade ini telah dihasilkan UU yang signifikan. Organisasi guru dan pengelola sekolah menginginkan bahwa sebaiknya pemerintah hanya menawarkan bantuan keuangan dan pelayanan khusus tanpa harus ikut terlibat dalam kebijakan pendidikan. Banyak pendidik yang berpendapat bahwa pemerintah pusat telah merebut tanggung jawab pemerintah lokal dan negara bagian serta telah memberikan mandat yang tidak didanai kepada agensi negara bagian dan lokal yang berjuang untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Departemen pendidikan AS merupakan agensi utama yang meliputi program atau kegiatan pendidikan. Sebelum menjadi departemen pendidikan, pada tahun 1867 namanya adalah kantor pendidikan. Kantor ini memiliki tanggung jawab terkait (1) mengatur dana bantuan dan kontrak dengan departemen pendidikan negara bagian, distrik, sekolah dan sekolah tinggi/universitas, (2) terlibat dalam inovasi dan penelitian pendidikan, (3) memberikan pelayanan kepemimpinan, konsultasi dan keuangan yang berkaitan dengan pendidikan.

Pada tahun 1980 kantor pendidikan berubah nama menjadi departemen pendidikan. Menteri pendidikan menyebarkan pandangan dan pengaruhnya. Selain mengatur kebijakan pendidikan dan mempromosikan program untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, menteri pendidikan juga dapat melakukan penekanan secara persuasif dalam lingkaran politik dan pendidikan. Departemen pendidikan ini telah tumbuh baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya terutama setelah melaksanakan beberapa langkah untuk menerapkan ketentuan *No Child Left Behind* (NCLB).

Pada tahun 2001, kongres menyetujui gagasan reformasi pendidikan Presiden Bush, UU *No Child Left Behind* (NCLB), dan tetap ada hingga pemerintahan Obama. NCLB ini dimaksudkan untuk meningkatkan sekolah yang masih berkualitas rendah dan bertanggung jawab atas negara bagian dan distrik sekolah lokal dalam memenuhi standar siswa yang tinggi. Standar siswa ini akan diukur melalui tes tahunan di bidang membaca dan matematika. Negara bagian dan distrik sekolah lokal yang gagal meningkatkan kemampuan siswa, khususnya siswa dibawah rata-rata maka akan menerima bantuan yang lebih sedikit dari pemerintah pusat.

D. Sekolah Non Publik

Sekolah non publik tidaklah kebal terhadap pengaruh pemerintah. Secara khusus banyak hukum pendidikan negara bagian diterapkan untuk sekolah swasta dan paroki seperti institusi umum. Badan legislatif di banyak negara bagian mengeluarkan UU untuk membantu sekolah swasta dan memberikan bantuan dana publik dalam bidang transportasi siswa, pelayanan kesehatan, layanan makan siang di sekolah dan lainnya. Sekolah swasta biasanya beroperasi dengan cara yang berbeda dengan sekolah umum. Mereka mempunyai kepala sekolah tetapi kekurangan kader pendukung. Kekuasaan mereka biasanya berasal dari direktur atau komite sekolah yang tidak sama dengan dewan sekolah umum.

E. Reformasi Pendidikan AS

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu

Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu: 1) Pada tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar. 2) Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%. 3) Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada “grade 4, 8 dan 12” mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern. 4) Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika. 5) Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. 6) Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar.

Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000. Dan memang itulah yang terjadi di AS. Pokok-pokok reformasi pendidikan itu akhirnya ditindak lanjuti dengan berbagai kreasi kebijakan pendidikan di tingkat negara bagian dan pemerintah daerah. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan Gubernur itu dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing negara bagiannya. Gebrakan yang dilakukan adalah: 1) Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, 2) Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa, 3) Menjalankan system penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru, 4) Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah-sekolah. Tambahan dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah. Akhirnya AS benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden AS, keberhasilan AS dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus.

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Amerika dan Indonesia

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan menyatakan “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Dengan kata lain UU Sisdiknas tahun 2003 dan PP tahun 2005 mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat layanan pendidikan bermutu. Menurut Sallis (2012), upaya peningkatan mutu pendidikan melalui Total Quality Management (TQM). TQM dalam pendidikan adalah pendekatan pengelolaan peningkatan mutu secara menyeluruh melalui upaya perbaikan terus-menerus dengan mempergunakan dan memberdayakan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia.

Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau kota (Dinas Pendidikan), dewan sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat luas. Jika dibandingkan dengan Amerika adalah seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan penyelenggaraan pendidikan Amerika Indonesia

No	Komponen	Amerika	Indonesia
1	Sistem	Desentralisasi	SD-SMP tingkat Kabupaten SMA, SMK tingkat propinsi
2	Pihak terlibat	Departemen pendidikan pusat, lokal, Dewan Sekolah Lokal, Pengawas Sekolah (Super Intendant), Staf Kantor Pusat, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat	Kantor pusat, diknas kab/kota, diknas propinsi, pengawas, dewan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, masyarakat
3	Peran kantor pusat	memikul tanggung jawab pengambilan keputusan yang signifikan mengatur kebijakan pendidikan dan mempromosikan program untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, menteri pendidikan juga dapat melakukan penekanan secara persuasif dalam lingkaran politik dan pendidikan.	menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antara daerah kabupaten/kota dan antar daerah provinsi
4	Peran pemerintah daerah (Provinsi)	menerapkan hukum yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan peraturan dewan pendidikan negara bagian	memfasilitasi dan membantu staf sekolah atas tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa dan seleksi karyawan
5	Peran Dewan Pendidikan	mengembangkan peraturan untuk menerapkan peraturan pendidikan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang	memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
6	Keberadaan Komite Sekolah	Ada ditingkat kota/kab	Di sekolah
7	Peran komite/dewan sekolah	1) mengurus anggaran pendidikan, 2) mengangkat Super Intendant (SI); 3) membuat kebijakan pendidikan termasuk kurikulum; dan 4) melaporkan ke publik (masyarakat)	menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
8	Peran Pengawas sekolah	1) Mengangkat <i>Principals</i> atau Kepala Sekolah; 2) mengangkat staf dan direktur-direktur pendidikan (subdin-subdin); 3) melaksanakan pengelolaan pendidikan; dan 4) melaporkan ke komite sekolah	fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah

			dalam menerjemahkan visi penda
9	Peran kepala sekolah	1) Sebagai manager di sekolah, mengangkat guru-guru, melaksanakan kurikulum dan melaporkan ke SI. Tugas guru adalah 1) membuat draft kurikulum; 2) menentukan buku (tapi tidak boleh menjual); 3) mengajar, dan melaporkan ke principals; 4) mengetahui kurikulum yang tertulis; 5) memantau kurikulum yang diajarkan; 6) memberi masukan terhadap kurikulum yang tertulis dan diujikan; 7) menganalisis data ujian; 8) menentukan rencana pengembangan pencapaian akhir siswa dengan melibatkan semua guru; dan 9) memberitahu orang tua siswa cara membantu anaknya agar berhasil.	sangat sentral sebagai figur pengambil kebijakan dan keputusan strategis dalam pengembangan sekolah.
10	Peran guru	Membuat perencanaan, Melaksanakan KBM, Melaksanakan bimbingan, Melakukan penilaian, dan Melakukan analisis	Membuat perencanaan, Melaksanakan KBM, Melaksanakan bimbingan, Melakukan penilaian, dan Melakukan analisis
11	Peran administrasi	petugas sekolah (pengawas atau komisararis pendidikan negara bagian) mengepalai departemen pendidikan dan juga kepala eksekutif dewan sekolah dan biasanya mereka adalah pendidik profesional	pengembang dan pemimpin dalam mencapai tujuan
12	Orang tua dan masyarakat	Identifikasi tujuan, prioritas, dan kebutuhan, Pemilihan dan evaluasi guru dan kepala sekolah, Pengembangan kurikulum dan ekstrakurikuler, Dukungan untuk mendanai sekolah, Rekrutmen sukarelawan, Bantuan untuk siswa di sekolah dan program Hotline PR	Orang tua: home based dan school based. Masyarakat menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial
13	Pendanaan Pendidikan	APBN Federal, APBD local, APBD district	APBN, APBD Propinsi, APBD Kab/kota, masyarakat

B. Manajemen Berbasis Sekolah Indonesia

Ukuran Keberhasilan MBS

Menurut Nurkolis (2003), ukuran-ukuran keberhasilan MBS di Indonesia dinilai dengan sembilan kriteria: 1) Apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat, 2) Kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik, 3) Tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik (rasio jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar), 4) Program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh Masyarakat, 5) Keadilan dalam penyelenggaraan Pendidikan, 6) Meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, 7) Semakin baiknya iklim dan budaya kerja di sekolah, 8) Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik karen asumbangan pemikiran, tenaga, dan dukungan dari masyarakat luas, 9) Terjadinya demokratisasi penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Implementasi MBS

Dalam perjalanannya implementasi MBS mengalami permasalahan yaitu sistem regulasi teknis yang tidak jelas, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak, dan rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Mengenai keberadaan sekolah swasta di Indonesia menurut UU nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan yang sama bagi sekolah-sekolah swasta baik umum maupun madrasah dalam memperoleh fasilitas mulai dari guru pengajar, gedung sekolah, buku-buku pelajaran sampai bahan pendukung pendidikan lainnya.

C. Reformasi Pendidikan Indonesia

Perkembangan politik dan kebangsaan Indonesia dapat dibagi menjadi 1) Masa penjajahan, (2) Masa awal kemerdekaan atau Orde Lama (Orla), Masa Orde Baru (Orba) dan (3) adalah Masa Reformasi, reformasi dimulai dari robohnya rezim Orde Baru, yakni pada tahun 1998 dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi Presiden setelah memerintah lebih dari 32 tahun. Berbagai bentuk reformasi terjadi, baik dalam politik, ekonomi, hukum, termasuk juga reformasi pendidikan. Orde Reformasi dimulai sejak presiden BJ Habibie menggantikan Suharto yang dilantik 21 Mei 1998. Walaupun gambaran reformasi pada awalnya serba negatif, namun lambat laun keadaan bisa berubah secara perlahan-lahan. Mengapa perlu reformasi pendidikan? Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat yang berdaya. Dalam masyarakat demokrasi, setiap masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri dan bukan tertekan oleh kekuasaan absolut. Keadaan yang tertekan dan terbelenggu oleh diktator dan sentralisasi, akhirnya mengantarkan Indonesia kepada era reformasi.

Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan mulai berubah. Muncul undang-undang pendidikan baru. Undang-undang pendidikan yang baru menginginkan sistem pendidikan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem pemerintah yang juga berubah menjadi desentralisasi UU No. 29 tahun 1999. Isu reformasi pendidikan bukanlah suatu hal yang baru.

Gagasan pembaruan pendidikan memiliki momentum yang amat mendasar, dan berbeda dengan gagasan pada era sebelumnya. Salah satu perubahan dasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi adalah lahirnya UU No. 29 Tahun 1999, serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menggantikan Sisdiknas lama UU No. 22 Tahun 1989 serta terbitnya aturan-aturan penunjang sebagai kelengkapan UU tersebut berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya. Kedua undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam pendidikan, yang mendorong pendidikan menjadi urusan publik luas dan mengurangi otoritas pemerintah. Arah reformasi pendidikan adalah demokratisasi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan, didukung oleh komunitasnya sebagai kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sistem desentralisasi pendidikan belum berada pada tingkat kelembagaan, kecuali perguruan tinggi, melainkan baru pada tingkat-tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini disebabkan kemampuan personalia pendidikan yang belum memadai. Belum cukup waktu untuk membina personalia agar terampil mengoperasikan sistem yang baru ini. Kelemahan ini diperparah lagi dengan adanya pemindahan pegawai pendidikan secara besar-besaran dari pemerintah pusat ke daerah, dari provinsi ke kabupaten atau kota. Mereka semua harus ditempatkan, sementara keahlian mereka belum tentu cocok untuk keperluan sistem baru ini.

Sedangkan dalam tataran praktik, era reformasi dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. KBK sudah direncanakan semenjak tahun 1994 masih tetap berlangsung. Adanya pelaksanaan UU No. 60 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas. Peraturan pemerintah tentang pendidikan secara umum termaktub

dalam Undang-undang yang ditetapkan pemerintah (Sugianto, 2022). Peningkatan kualitas pendidikan di era reformasi melalui perkembangan pendidikan secara nasional belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Berbagai strategi dan inovasi dalam proses pendidikan ternyata sampai saat ini masih jauh dari harapan.

Suatu inovasi yang luar biasa saat adanya berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai kepada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pendidikan diarahkan kepada pencapaian kompetensi, maka kurikulum yang disiapkan juga untuk pencapaian kompetensi ke arah yang lebih baik. KBK mengarah kepada pencapaian beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan siswa yang lebih baik dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan siswa pada tingkat pendidikannya (Hadiansyah et al., 2019; Sari, 2022).

Terkait dengan pelaksanaan kurikulum KBK-KTSP ini kita kenal salah satu produknya adalah Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa pada jenjang satuan pendidikan dengan standar nilai tertentu. Ketika berbicara tentang kelulusan siswa, ada kekhawatiran yang luar biasa dari pihak sekolah dan masyarakat jika ternyata siswa tidak mampu memenuhi standar minimal nilai kelulusan. Betapa tidak, sekolah akan dianggap gagal jika banyak siswanya yang tidak lulus dan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sementara para orang tua akan merasa malu jika mendapatkan anaknya dalam keadaan tidak lulus ujian nasional UN.

Selanjutnya, praktek pendidikan yang ada pada era reformasi ini adalah dibentuknya komite sekolah dan adanya manajemen berbasis sekolah. Keberadaan komite sekolah akan membantu mengontrol pendidikan yang terjadi di sekolah, karena komite sekolah berasal dari orangtua siswa yang bertugas mengontrol pelaksanaan pendidikan sekolah baik dalam bentuk pelaksanaan kurikulum, maupun segala hal demi kemajuan pendidikan di sekolah. Adanya manajemen berbasis sekolah juga akan membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan lebih baik. Apa yang disampaikan di awal bahwa pada era ini pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi desentralistik. Sekolah dapat menentukan kebijakan di sekolahnya, tidak lagi menunggu aturan dari pusat, namun tetap dalam kontrol dari pemerintah.

Selanjutnya Terdapat perubahan signifikan dalam konsep pendidikan di Indonesia dengan diperkenalkannya kurikulum Merdeka Belajar di semua satuan pendidikan. Konsep ini dirancang untuk menggeser paradigma pendidikan konvensional yang telah lama menjadi norma di Indonesia, dengan tujuan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif bagi para siswa. Paradigma baru dalam pendidikan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan abad ke-21, seperti pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kerja sama, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital (Sunario Tanggur, 2023).

D. Implikasi dan Rekomendasi

Bagi Indonesia khususnya, sejumlah implikasi yang harus dipenuhi agar tujuan dan manfaat MBS dapat dicapai berupa perubahan peran dari pihak yang mencakup pejabat dinas pendidikan, para pengawas sekolah, para kepala sekolah, para guru dan siswa, maupun masyarakat dan orang tua siswa. Stakeholder pendidikan Indonesia harus mampu menciptakan inovasi sekolah (*struggling schools*) dan akuntabilitas sekolah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengenal sistem pendidikan di Amerika. 1) Implikasi teoritis memberikan kontribusi mengenai pengelolaan pendidikan dengan berbagai pendekatan, konsep dan pendekatan secara teoritis. 2) Implikasi praktis memberikan kontribusi dalam praktik profesional, pengembangan staf, pembentukan dan pembinaan organisasi profesional untuk pendidik, orang tua maupun siswa.

Rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia adalah 1) Seluruh stakeholder pendidikan, seyogyanya tetap mendukung kebijakan pemerintah, 2) Orang tua dan masyarakat: partisipasi aktif dari orang tua sebagai *customers* kedua, dan masyarakat sebagai *customers* ketiga untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan sumber daya yang dimiliki dan diharapkan tidak selalu diukur dengan penggalangan dana. 3) Pemerintah: dibuatkan undang-undang untuk

memberikan otonomi yang nyata kepada sekolah, 4) Guru, kepala sekolah dan pengawas: Agar memperkuat kapasitas local dan menciptakan inovasi untuk sekolah. 5) Kepala sekolah: Menciptakan system akuntabilitas yang dapat dilaksanakan baik di sekolah.

SIMPULAN

Pendidikan di Amerika Serikat diatur dalam tiga level pemerintahan yaitu lokal, negara bagian, dan pusat. Pada level lokal, dewan sekolah, pengawas sekolah, staf kantor pusat, dan kepala sekolah berperan serta dalam mengatur dan menjalankan sekolah. Distrik sekolah menjalankan perannya dengan pengaturan yang terbatas. Badan pembuat UU bertanggung jawab menciptakan dan mempertahankan sekolah publik serta membuat hukum yang berkaitan dengan pendidikan. Secara umum peran pemerintah pusat dalam pendidikan adalah mengatur dana bantuan, inovasi dan penelitian pendidikan, memberikan pelayanan kepemimpinan, konsultasi dan keuangan. Sekolah non publik/swasta tidak kebal terhadap pengaruh pemerintah, mereka masih mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi secara operasional berbeda dengan sekolah umum. Sementara di Indonesia mengacu pada MBS yang dianggap sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kajian tentang implementasi MBS di Indonesia memberikan gambaran sejauh mana masing-masing pihak telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan MBS, kekuatan, dan kelemahan, dan peluang serta ancamannya. Mengukur keberhasilan MBS harus dilihat dari perspektif yang lebih luas baik prestasi akademik maupun non akademik siswa, kuantitas, dan kualitas pendidikan, efisiensi, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan, kondisi dan kualitas kerja guru dan staff dalam menjalankan pekerjaannya di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Gp, H. (2016). Sistem Pendidikan Di Amerika Serikat. *Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 2(January), 311–317.
- Hadiansyah, R. R., Pradana, R. Y., & Mustiningsih. (2019). Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia. *Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 259–264.
- Hariato, G. (2021). *EDUCATION SYSTEMS IN THE UNITED STATES OF AMERICA COLLABORATIVE-COOPERATIVE LEARNING MODEL* View project. January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21257.26722>
- Mustika, D., Fitri, A. H., Ananda, A., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2022). Kajian Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia dan Amerika Serika. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4356–4362. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2799>
- Pala, S., Rahman, H., & Kadir, M. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 2(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v2i1.370>
- Purwanta, H. (2016). Kajian Perbandingan Historiografi Pendidikan Di Amerika Serikat, Australia, Dan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(2), 154. <https://doi.org/10.15294/paramita.v25i2.5201>
- Sari, E. C. (2022). Kurikulum Di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Kurikulum Pendidikan. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(2), 93–109. <https://doi.org/10.59404/ijce.v2i2.54>
- Sugianto, R. (2022). Analisis Perbandingan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP (Kurikulum Berbasis Sekolah), dan Kurikulum 2013. *Yasin*, 2(3), 351–360. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i3.416>
- Sunario Tanggur, F. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar di Wilayah Pedesaan Pulau Sumba. *HINEF: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan*,

2(2), 23–29.

Wahab Syakhrani, A., Hidayatullah, A., Azhar, M., Zulkifli, M., & Asshadiqi, F. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 2(1), 27–36.

Yanuarti, E., Purnama, D., & Hs, S. (2020). Analisis Perbandingan Pendidikan Multikultural (Indonesia, Amerika, Kanada, Inggris). *Jurnal IAIN Bengkulu*, 19(1), 46–65.